

J.1. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN
PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PROSEDUR PERSETUJUAN
BERSAMA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA
DI LUAR PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NPWP/Nomor Identitas Pajak*) : (2)
Jabatan : (3)
Alamat : (4)

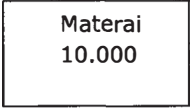
Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib
Pajak*)
Nama : (5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)
Kedudukan : Pihak yang mengajukan/pihak yang
terkait dengan pelaksanaan Prosedur
Persetujuan Bersama*) (8)

dengan ini menyatakan tidak mengajukan keberatan, permohonan
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar,
gugatan, banding, atau peninjauan kembali*) atas materi yang diajukan
Prosedur Persetujuan Bersama dengan perincian sebagai berikut: (9)

No	Jenis Transaksi	Tahun/Masa Pajak	Jumlah (Rp/US\$)
1.			
2.			
Dst.			

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa
paksaan dari pihak manapun.

....., (10)
Pemohon/wakil/kuasa dari
Wajib Pajak*)



..... (11)

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA
DI LUAR PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan nama Warga Negara Indonesia.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi dengan nomor identitas pajak Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (3) : Diisi dengan jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, diisi alamat Warga Negara Indonesia di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan kedudukan terkait permohonan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (9) : Diisi dengan detail materi yang diajukan Permohonan Persetujuan Bersama.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat pernyataan dibuat.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan di atas materai dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak/Warga Negara Indonesia.